

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah

Di dalam suatu kelompok tentu selalu muncul seorang pemimpin yang mengatur atau mengarahkan perilaku kelompok masyarakat kearah tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam antar orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya (bawahan).

Pemahaman mengenai kepemimpinan kepala sekolah, tidak akan terlepas dari pemahaman tentang kepemimpinan secara umum, karena itu akan menjadi suatu landasan berpikir agar nantinya terbangun suatu pemahaman yang komprehensif. Secara etimologis (ilmu asal kata) "pemimpin" dan "kepemimpinan" itu berasal dari kata pimpin (*Inggris to lead*) maka dengan konjugasi berubah menjadi "pemimpin" (leader) dan "kepemimpinan" (*leadership*).

Menurut Thoha dalam Tatang (2015:211), pemimpin adalah subjek atau pelaku dari unsur-unsur yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab utama bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Meskipun tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang sama, secara timbal balik dan fungsional kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan.

Dalam organisasi sekolah pemimpin yang bertugas membina bawahannya adalah kepala sekolah, pemilik, hingga menteri pendidikan. Kepemimpinan dalam sekolah sebagai lembaga pendidikan berkaitan dengan jabatan dan fungsi struktural ataupun fungsionalnya.

Menurut Lestari dalam Tatang (2015:211), pemimpin pendidikan harus memiliki integrasi keterampilan teknis, pedagogis, profesional, manajerial, yang juga disebut sebagai profesional-as-administrator yang mencakup dualitas peran sebagai pimpinan eksekutif (chief executive) dan memimpin secara profesional (leading professional), dalam aspek internal ataupun eksternal.

Menurut Lunenberg dan Orstein dalam Tatang (2015:212), secara garis besar pemimpin pendidikan memiliki tiga peran utama, yaitu bidang kepemimpinan, manajerial dan kurikulum-pengajaran.

1. Peran kepemimpinan kepala sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif sehingga para stafnya berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran.
 - b. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal sekolah, seperti pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, siswa dan kelompok eksternal, seperti profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya.
2. Peran manajerial kepala sekolah adalah sebagai berikut

- a. Peran manajerial merupakan aspek utama kepemimpinan sekolah.
 - b. Lippman mengembangkan teori empat faktor tentang kepemimpinan yang mendukung yaitu:
 1. Kepemimpinan struktural
 2. Kepemimpinan fasilitas
 3. Kepemimpinan yang mendukung
 4. Kepemimpinan partisipatif.
3. Peran kurikulum-pengajaran kepala sekolah

Bidang kurikulum-pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Murphy mengembangkan enam peran kepala sekolah yang efektif di bidang kurikulum dan pengajaran, yaitu:

- a. Menjamin kualitas pengajaran
- b. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran
- c. Mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran
- d. Mengoordinasikan kurikulum
- e. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan
- f. Monitoring kemajuan siswa

Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial dan pengaruh sengaja dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas dan relasi-relasi di dalam sebuah organisasi. Perbedaan definisi tersebut terletak pada siapa yang menggunakan pengaruh, cara menggunakan pengaruh dan sasaran yang ingin dicapai pengaruh dan hasil dari usaha menggunakan pengaruh.

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik kebutuhan bekerja, motivasi, rekreasi, kesehatan, sandang, pangan, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya yang pantas didapatkannya. Berdasarkan pengertian kepemimpinan yang dikemukakan para ahli diatas, menurut penulis kepemimpinan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah kelompok untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan kinerja anggotanya dalam mencapai tujuan.

2.1.1 Kompetensi Kepala Sekolah

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris *Competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja sebagai mengelola suatu keahlian selaras dengan bidangnya. Kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.

Kepala sekolah juga diharapkan memiliki kompetensi sebagaimana yang di persyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah dapat kita lihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Dimensi Kompetensi dan Kompetensi Kepala Sekolah

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
1. Kepribadian	1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi

	<p>teladan bagi komunitas di sekolah/madrasah.</p> <p>1.2 Memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri.</p> <p>1.3 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.</p> <p>1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi</p> <p>1.5 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah.</p> <p>1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.</p>
2. Manajerial	<p>2.1 Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.</p> <p>2.2 Mengembangkan sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan</p> <p>2.3 Dalam rangka pendayagunaan sumberdaya sekolah/madrasah</p> <p>2.4 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/ madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.</p> <p>2.5 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.</p> <p>2.6 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal</p> <p>2.7 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah secara optimal</p> <p>2.8 Mengelola peserta didik, dalam rangka penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.</p> <p>2.9 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>2.10 Menegelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.</p> <p>2.11 Mengelola ketatausahaan sekolah/ madrasah dalam mendukung pencapaian sekolah.</p> <p>2.12 memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran sekolah/madrasah.</p> <p>2.13 Melakukan monitoring, evaluasi dan</p>

	pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya.
3. Kewirausahaan	<p>3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah</p> <p>3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah.</p> <p>3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.</p> <p>3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.</p> <p>3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produk/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.</p>
4. Supervisi	<p>4.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p> <p>4.2 Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.</p> <p>4.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p>
5. Sosial	<p>5.1 Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah</p> <p>5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.</p> <p>5.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.</p>

Karena itu perlu ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Mengingat kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dalam mengembangkan sumberdaya sekolah terutama mendayagunakan guru

dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab (Depdiknas,2000) dikutip dari buku Wahyudi(2012:32).

2.1.2 Standar Kepala Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April Tentang Standar menjadi Kepala Sekolah/Madrasah yaitu:

2.1.2.1 Kualifikasi Kepala Sekolah

Kualifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.

1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat(DIV) kependidikan /nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 Tahun.
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak sekurang kurangnya 3 tiga tahun di TK/RA dan

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi Non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

a. Kepala Taman kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru TK/RA
2. Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah(SD/MI) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru SD/MI
2. Miliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dan
3. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru SMP/MTs
2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs
3. Memiliki sertifikat kepala SMP/ MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah

d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SM/MA) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru SM

2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SM/MA dan
 3. Memiliki sertifikat kepala SM/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMA/MAK) adalah sebagai berikut:
Berstatus sebagai guru SMA/MAK
1. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MAK dan
 2. Memiliki sertifikat kepala SMA/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa / sekolah menengah pertama luar biasa/ sekolah menengah atas luar biasa
1. Berstatus sebagai guru satuan pendidikan
 2. Memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru
 3. Memiliki sertifikat kepala
- g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:
1. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah
 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan, dan
 3. Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan pengertian Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Sebagai orang yang mendapatkan tugas tambahan berarti tugas pokok kepala

sekolah tersebut adalah guru yaitu sebagai tenaga dan pendidik, maksudnya dalam suatu sekolah seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan bimbingan.

2.2 Pengertian Manajemen

Tentunya kita pasti sering dengar kata manajemen bukan. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut Hasibuan (2011:12) dalam manajemen, dasar, pengertian, dan masalah, ia mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan tenaga dan profesionalitas orang lain. Graffin dalam Tatang (2015:15) Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan, sedangkan efisien untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan benar, dan terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja sama dengan orang-orang yang bersangkutan untuk menentukan, mengatur, merencanakan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

2.3 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Rohiat (2010:47), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada.

Menurut Sagala (2007:132), Manajemen Berbasis Sekolah upaya menumbuhkan otonomi pendidikan, salah satunya dapat dilakukan melalui prakarsa masyarakat dan keterlibatan Masyarakat. Sudah saatnya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan diambil dan bertumpu pada sekolah dan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orangtua, dan masyarakat yang berhubungan dengan program sekolah), untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kebijakan pendidikan nasional.

2.3.1 Landasan Manajemen Berbasis Sekolah

Secara yuridis, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dijamin oleh peraturan perundang-undang

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1)” menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada bab VII tentang bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran(3), yaitu”terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat(*scholl community based management*)”
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- d. Kepmendiknas Nomor 087 tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah.

2.3.2 Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Definisi tentang manajemen berbasis sekolah dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain Mulyasa menjelaskan bahwa : “Manajemen berbasis sekolah

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang ditunjukkan dengan pernyataan politik. (Mulyasa, 2007: 56).

Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional. Perlu digaris bawahi bahwa pencapaian tujuan Manajemen Berbasis Sekolah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (partisipasi,transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya).

2.3.3 Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Manfaat manajemen berbasis sekolah akan menghasilkan nilai positif bagi sekolah menurut Asmani dalam Natalia Zega (2012:54), antara lain sebagai berikut:

- a. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas
- c. Pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal:
 - Menetapkan sasaran peningkatan mutu

- Menyusun rencana peningkatan mutu
 - Melaksanakan rencana peningkatan mutu
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu
- d. Penggunaan dan lebih efektif dan efisien sesuai skala prioritasnya.
 - e. Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi.
 - f. Dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab

Urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan Tanggung Jawab Sekolah.

Secara umum, pergeseran dimensi pendidikan dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah telah diuraikan pada butir secara lebih spesifik, pertanyaan adalah urusan-urusan apa sajakah yang perlu menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) tahun 2004 beserta sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pelaksanaannya, terutama PP tentang Pembagian Urusan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/kota, dan sekolah harus digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun sebagaimana urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah meliputi:

1. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan

karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di sekolah.

2. Perencanaan dan Evaluasi

Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (*school based plan*). Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu kemudian sekolah membuat rencana peningkatan mutu. Sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil dari program-program yang telah dilaksanakan.

3. Pengelolaan Kurikulum

Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kurikulum standard yang berlaku nasional, yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) , khususnya dalam penentuan standard kompetensi dan kompetensi dasar, padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan, memperdalam, memperkaya dan memodifikasi tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu dengan melakukan diversifikasi kurikulum, mengembangkan indikator –indikatornya, dan bahkan sampai dengan menyusun kurikulum satuan pendidikan.

4. Pengelolaan Ketenagaan

Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (reward and punishment), hubungan kerja sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah (guru tenaga administrasi laporan, dsb). Dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan/imbal jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

5. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah.

6. Pelayanan siswa

Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga pengurusan alumni sebenarnya telah di desentralisasikan sejak lama.

7. Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan)

Menurut Bapadal Prasarana sekolah pada umumnya sangat sederhana, lebih merupakan ruang-ruang. Yang dimaksud dengan diruang disini adalah bukan hanya ruang tempat kegiatan proses belajar mengajar saja, melainkan juga semua fasilitas ruang, termasuk lapangan/ kebun yang menunjang kegiatan pendidikan.

Fasilitas sekolah di Mts Nur Ibrahimy hampir sudah mencukupi yaitu laboratarium IPA, laboratorium bahasa, perpustakaan, usaha koperasi sekolah (UKS), dan infokus namun hanya masih belum banyak sesuai target. Dan untuk beribadah saat ini dipakai ruangan TK, karena belum ada tempat khusus beribadah sebagaimana semestinya, sebab tempat di sekolah tersebut kurang mendukung sehingga saat ini belum bisa didirikannya gedung Mushollah.

8. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Dewan Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi dan pengawasan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Keberadaan komite sekolah diperkuat dari aspek yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56 menyebutkan bahwa: "Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan" dan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Menurut Hasbullah (2006: 95), peran komite sekolah pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan

pendidikan disatukan pendidikan. Pengembangan pendidikan secara lebih inovatif juga akan semakin memungkinkan, lahirnya ide-ide cemerlang, dan kreatif semua pihak terkait (*stakeholder*) pendidikan. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, dimana posisinya dan apa manfaatnya. Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dengan mengacu pada standar pelayanan minimal meliputi : kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, dan peran serta masyarakat. Pemberdayaan manajemen komite sekolah adalah suatu pengaturan atau pemanfaatan potensi yang ada pada badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tujuan pembentukan komite sekolah adalah :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menciptakan suasana

dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat
Sedangkan fungsi Komite Sekolah adalah :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 1. kebijakan dan program pendidikan
 2. rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).
 3. kriteria kinerja satuan pendidikan

4. kriteria tenaga pendidikan
5. kriteria fasilitas pendidikan
6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

2.3.4 Program Sekolah

Sekolah MTs Nur Ibrahimy memiliki program sekolah yang harus dipatuhi yaitu:

1. Harus hafal Juz Ammah
2. Tuntas sholat fardhu, sholat sunnah, dan sholat jenazah
3. Mampu berpidato (khutbah)
4. Menyelenggarakan sekolah dari sabtu-minggu khusus hari minggu khusus ekstrakurikuler

2.3.5 Visi dan Misi

Sekolah MTs Nur Ibrahimy mempunyai Visi Misi dan Tujuan yaitu:

Visi:

Membina generasi Islam supaya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan berguna bagi Agama nusa dan bangsa.

Misi:

1. Mendidik anak-anak yang berusia muda/ dini berilmu, beriman dan bertaqwa.
2. Terciptanya dan berkembangnya belajar yang kondusif, kreatif dan membina generasi yang memiliki kecerdasan dan dapat menciptakan alam lingkungan.

Tujuan:

1. Menciptakan manusia yang beriman, berakhlaqul karimah dan kepada Allah SWT.
2. Mampu menempatkan diri ditengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat.
3. Patuh terhadap kedua orang tua.

2.3.6 Tenaga Pendidik

Menurut Leonard, (2015:192), tenaga pendidik merupakan unsur terdepan yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Tenaga pendidik yang kompeten sangat menjamin perbaikan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa guru memang harus memiliki kompetensi yangt luar biasa.

Tenaga pendidik adalah yang bekerja sebagai guru profesional, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Sebagai guru profesional harus bisa menjadi guru yang aktif, kreatif dan bertanggungjawab. Di Mts Nur Ibrahimy tenaga pendidiknya sudah sesuai jurusannya masing-masing, rata-rata semua guru sudah S1.

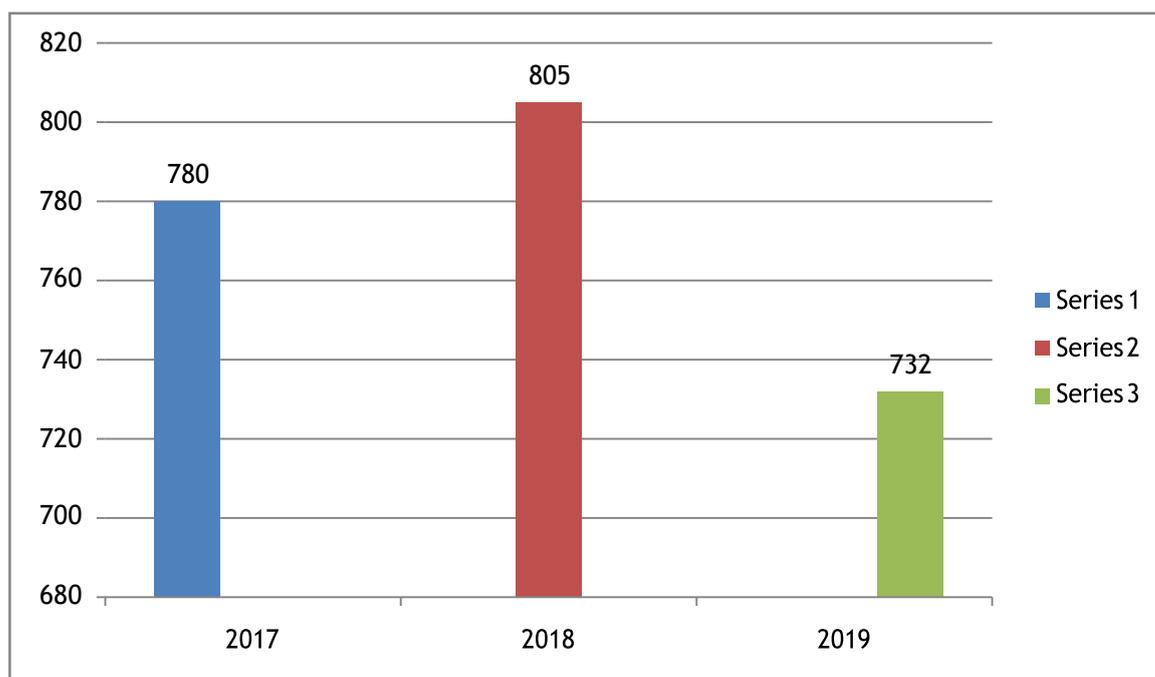
2.3.7 Grafik siswa di sekolah Mts Nur Ibrahimy

Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Untuk melengkapinya, grafik sering disertai simbol-simbol verbal. Manfaatnya adalah dengan grafik cepat memungkinkan mengadakan analisis, interprestasi, dan perbandingan antara data-data yang diasajikan, baik dalam

ukuran, jumlah, pertumbuhan, maupun arah. Penyajian data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis.

Gambar 3.1

GRAFIK JUMLAH SISWA DI MTS NUR IBRAHIMY



JUMLAH SISWA :

DI TAHUN 2017 780

DI TAHUN 2018 805

DI TAHUN 2019 732

a. Di tahun 2017 sekolah Yayasan memberikan peluang untuk mendaftarkan di MTs Nur Ibrahimy sehingga di Tahun 2017 mendapatkan jumlah siswa 780 di tahun 2017 perkelas mencapai 40-50an.

- b. Di tahun 2018 terlihat lebih naik dibandingkan di tahun 2017, karena belum ada peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih memakai emis di isian pendaftaran Aplikasi di MTs Nur Ibrahimy masih bisa 40an siswa. Sehingga jumlah siswa yang mendaftar di Tahun 2018 adalah berjumlah 805 siswa.
- c. Di tahun 2019 nampak sangat menurun dibandingkan di tahun 2017 dan 2018 karena di tahun 2019 penerimaan siswa baru sudah terbatas, sudah kenak peraturan PPDB keputusan dari Menteri untuk di MTs Swasta maupun negeri. Sehingga jumlah siswa yang diterima di Tahun 2019 berjumlah 732 siswa dalam perkelas berjumlah 32 siswa.

2.3.8 Laboratorium Komputer

Lab komputer adalah sebagai media pembelajaran sangat berperan penting terhadap proses keberhasilan pembelajaran di sekolah sehingga guru dan siswa diharapkan agar dapat menguasai teknologi dan informasi yang sangat penting di era globalisasi sekarang ini. Dengan menggunakan lab komputer siswa diharapkan agar dapat mencapai keberhasilan.

Di MTs Nur Ibrahimy mempunyai fasilitas dua ruang komputer yaitu laboratorium Bahasa dan laboratorium IPA.

2.4 Kerangka Konseptual

Manajemen adalah yang mengelola, mengatur dan bekerjasama untuk tujuan yang diharapkan. Manajemen berbasis sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengupayakan sekolah menyelenggarakan suatu pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa. Adanya kewenangan dalam pengelolaan

pendidikan merupakan kesempatan bagi sekolah secara optimal dan fleksibel meningkatkan kinerja staf, dan meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan.

Tanpa adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guru dan siswa dan staf lainnya tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan pencapaian yang sesuai harapan. Tentunya salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa harus dibarengi dengan adanya manajemen berbasis sekolah. setiap pekerjaan pasti ada alat untuk dibawak. Begitu juga guru dan siswa tentunya dalam menjalankan suatu pekerjaan pasti adanya suatu fasilitas atau sarana dan prasarana di sekolah. Seperti yang terdapat di sekolah MTs Nur Ibrahimy Kepala sekolah memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin yaitu bidang pengajaran, gedung sekolah, pengembangan kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, lab komputer, dan perlengkapan sarana dan prasana serta organisasi sekolah.

Maka dari itu cara manajemen berbasis sekolah harus diterapkan dalam satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada, agar peningkatan mutu pendidikan berhasil dan pembelajaran dapat terpenuhi dengan mencapai suatu tujuan prestasi yang baik, hal ini tentu tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di MTs Nur Ibrahimy.

2.5 Penelitian Relevan

1. Sri Nurabdiah Pratiwi (2016), Manajemen Berbasis Sekolah Meningkatkan Kualitas Sekolah, perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah memberi harapan

besar bagi setiap lembaga pendidikan formal atau sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan kondisi sekolah dan diharapkan mampu memberi kebebasan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas seluruh program kegiatan yang ada di sekolah.

2. Syamsuddin (2017), Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang di miliki. Oleh sebab itu Lembaga Pendidikan juga harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas dengan meningkatkan sumber daya pendidikan untuk memasuk kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan permintaan dan meningkatkan proses pendidikan setempat dengan mengembangkan unsur-unsur pokok penunjang yang diperlukan.
3. Asbin Pasaribu (2017), Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah, Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, upaya tidak ada yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka, terutama agar menjadi manusia dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi demokratis dan bertanggung jawab warga. Perwujudan pendidikan yang efektif dan efisien, hendaklah mewujudkan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai wujud dari reformasi pendidikan, sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik dan orangtua

peserta didik mempunyai andil yang sangat penting untuk mengawasi jalannya proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan.